

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS

**STATUS DAN KEDUDUKAN HAKIM BERDASARKAN
HUKUM KEPEGAWAIAN DI INDONESIA**



OLEH:

**ALIFIAN FAJAR ERDIATMA, S.H.
NIM. 032014153052**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**STATUS DAN KEDUDUKAN HAKIM BERDASARKAN
HUKUM KEPEGAWAIAN DI INDONESIA**

T E S I S

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Pemerintahan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh:

**ALIFIAN FAJAR ERDIATMA, S.H.
NIM. 032014153052**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

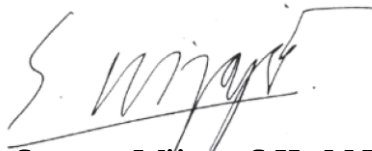
**Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 20 Januari 2022**

**Oleh
Dosen Pembimbing Utama:**



Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
NIP. 196912251995122001

Dosen Pembimbing Kedua:



Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
NIP. 196810201998021001

**Mengetahui :
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196401071989032001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 13 Januari 2022**

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

2. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

3. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

4. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.

ABSTRAK

Sebagai lembaga peradilan yang masuk dalam ranah yudikatif pada trias politica hakim merupakan suatu jabatan negara yang memiliki kewenangan peradilan sehingga dalam perekrutannya seharusnya sebagian besar harus dilakukan secara independen tidak terikat dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, karena dengan diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menjadikan hakim tidak lagi sebagai suatu kekuasaan independen dalam memutuskan suatu perkara. Apabila kekuasaan kehakiman dalam mencari atau merekrut hakim dengan merujuk pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tidak akan menghasilkan hakim yang independen dan memiliki dedikasi tinggi serta sebagai pelaku utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian *statute approach* dengan bersumber pada undang-undang sebagai sumber hukum utama dan *conceptual approach* yang berisi tentang konsep-konsep dan doktrin para ahli. Penelitian ini memberikan tujuan agar mengetahui fungsi dan tugas hakim hakim yang mandiri dalam negara hukum (*rechtstaat*) adalah mutlak. Hal ini sesuai dengan prinsip “*The International Commission of Jurist*” yaitu peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*).

Kata Kunci : Hakim, ASN, Pejabat Negara

ABSTRACT

As judiciary which is included in judicial at trias politica, judge is a state department who has judicial authorization so in their recruitment must be independent and not bounded with civil servant act. Because if it being regulated with civil servant act the judge is no more for being independent institutional. If judge is being regulated by civil servant act they are will not independent and have a high dedication for law enforcement in indonesia. This research using juridical normatice with statute approach and source is act as main source of the law and conceptual approach which contain about concept and doctrine of the experts. This research has a purpose to know about function and task to independent judge in state law is absolute according to principle the international commision of Jurist are independence and impartiality of judiciary.

Keywords : Judge, Civil Servant, State Official

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Jabatan Dan Pangkat Hakim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4215)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia yang besar dalam bentuk kesehatan dan kemudahan dalam penulisan tesis yang berjudul: **Status dan Kedudukan Hakim Berdasarkan Hukum Kepegawaian di Indonesia**. Tujuan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tema yang diambil dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana sistem kepegawaian Hakim di Indonesia. Besar harapan saya agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang kepegawaian Hakim di Indonesia.

Saya menyadari bahwa penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan lancar dengan adanya bantuan, dukungan, dan do'a berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya merasa berkewajiban untuk memberi penghargaan dengan menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat, rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan bagi semua muslim.
3. Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penyusunan tesis ini.
4. Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum., Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., Dr. M. Hadi

Shubhan, S.H., M.H., C.N. selaku Panitia Penguji tesis penulis yang berkenan memberikan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tesis ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang berkenan membagi ilmu, wawasan dan pengalamannya.
6. Seluruh staf yang ada di Fakultas Hukum Airlangga yang selalu membantu mahasiswa dalam hal perkuliahan.
7. Istri saya tercinta Puspita Rachman, S.Ei. serta anak saya Khevana Raisa Erdiatma yang tak henti-hentinya memberi kasih sayang, dukungan semangat maupun materi, nasihat dan doa terselesaikannya penyusunan tesis ini.
8. Kedua orang tua saya tercinta Mukhamad Sulaeman, S.H. dan Suwati, serta adik Adela Virzadiatma yang tak henti-hentinya memberi kasih sayang, dukungan semangat maupun materi, nasihat dan doa terselesaikannya penyusunan tesis ini.
9. Kedua mertua saya tercinta Abdul Rochman dan Siti Mudjiati, serta adik ipar Alvin Andhika Rahman yang tak henti-hentinya memberi kasih sayang, dukungan semangat maupun materi, nasihat dan doa terselesaikannya penyusunan tesis ini.
10. Seluruh keluarga besar Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara yang selalu memotivasi, membantu dan menyemangati dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala kebaikan yang telah mereka berikan. Pada akhir kata pengantar ini saya berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Surabaya, 20 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Tipe Penelitian.....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II DINAMIKA STATUS DAN KEDUDUKAN HAKIM DI INDONESIA.....	 10
2.1 Status dan Kedudukan Hakim di Masa Orde Baru dan Reformasi	10
2.2 Teori Trias Politica.....	15
2.3 Struktur Organisasi Mahkamah Agung.....	21
 BAB III AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL ATAS SISTEM KEPEGAWAIAN HAKIM DI INDONESIA.....	 31
3.1 Sistem Kepegawaian Hakim	31
3.1.1 Hakim Sebagai Pejabat Negara	33
3.1.2 Hakim Sebagai ASN.....	38
3.2 Proses Rekrutmen Hakim.....	41
3.3 Kepangkatan dan Pensiun Hakim	47
 BAB IV PENUTUP	 52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	53